

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hubungan yang strategis antara Turki dan Amerika Serikat telah terjalin sejak Perang Dunia II. Akan tetapi pada waktu tertentu, kebijakan politik luar negeri Turki mengalami perubahan atau pasang surut di dalam menanggapi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Seperti misalnya dalam Perang Teluk I tahun 1991, Turki sangat mendukung kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam serangan ke Irak, akan tetapi pada Perang Teluk tahun 2003, Turki tidak mendukung bahkan menentang kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat untuk menyerang Irak.

Turki berperan penting dalam perang Irak, karena negeri itu berbatasan langsung dengan Irak Utara, sehingga pasukan Amerika Serikat bisa masuk ke Irak melalui Turki, bila Turki mengizinkan. Turki adalah negara anggota NATO (*The North Atlantic Treaty Organization* atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara) dengan jumlah pasukan terbesar setelah Amerika Serikat.

Hubungan Turki dan Amerika Serikat menjelang dan setelah invasi Amerika Serikat ke Irak, terhitung yang terburuk dalam sejarah hubungan kedua negara itu. Deputi Menteri Pertahanan Amerika Serikat Paul Wolfowitz pernah mengkritik Turki karena tidak memberi dukungan yang cukup kepada Amerika Serikat dalam invasinya ke Irak. Seperti diketahui, parlemen Turki menolak membuka front

utara dari Turki bagi pasukan Amerika Serikat. Paul Wolfowitz juga meminta Ankara meninjau kembali kebijakan politik luar negerinya terhadap Iran dan Suriah.

Lalu, apakah Turki dan Amerika Serikat masih merupakan dua mitra strategis di Timur Tengah? Jawaban dari pertanyaan tersebut membutuhkan analisa faktor yang membawa mereka beraliansi.

Pada dasarnya ada gelombang anti-Amerikanisme di Turki, yang merupakan negara Muslim sekuler dan demokratis, khususnya setelah serangan Amerika Serikat pada tahun 2003. Kedua negara mengalami banyak ketegangan satu sama lain dan hal tersebut tidak pernah hilang hingga kini, malah makin kompleks. Ibarat membuka lapisan pertama, maka kita akan menemukan masalah, seperti itu juga gambaran mengenai hubungan Amerika Serikat dan Turki.

Dasar kemitraan strategis antara Turki dan Amerika Serikat telah sirna menyusul jatuhnya Uni Soviet dan Baghdad. Masa depan hubungan Amerika Serikat dan Turki bisa semakin buruk pula setelah Turki ragu mengirim pasukan perdamaian ke Irak sesuai dengan permintaan Amerika Serikat. Satu-satunya nilai strategis Turki bagi Amerika Serikat yang tersisa saat ini adalah keanggotaannya di NATO.

Bagi Turki, naiknya AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi* atau Partai Keadilan dan Pembangunan, dalam bahasa Inggris *JDP Justice and Development Party*) yang berbasis Islam ke tampuk kekuasaan merupakan awal dari menyusutkan kemitraan Amerika Serikat dan Turki dan upaya membatasi pengaruh politik

lembaga militer Turki. Atmosfer politik baru bagi Turki adalah bisa masuk sebagai anggota penuh Uni Eropa, yang memberi syarat kepada Ankara harus mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi. Yang berarti, harus membatasi pengaruh politik lembaga militer Turki sebagai syarat Ankara bisa menjadi anggota Uni Eropa. Suatu pertanda positif atas atmosfer politik Turki saat ini adalah untuk pertama kalinya sejak berdirinya negara Turki modern, delapan puluh tahun yang silam, Dewan Keamanan Turki dipimpin oleh seorang sipil.

Pasang surut hubungan bilateral Turki dan Amerika Serikat saat ini juga tengah menjadi sorotan semua kalangan komunitas internasional. Pasalnya, Turki yang didambakan Amerika Serikat untuk selalu menjadi mitra strategis dalam mengatasi masalah internasional terkait isu nuklir Iran kini malah membelot dari kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat.

Turki bersama Brasil dan Iran membuat kesepakatan historis segitiga Tehran tentang pertukaran uranium. Kesepakatan itu mengatur tentang pertukaran bahan uranium Iran ke Turki, dengan uranium dari Turki ke reaktor nuklir Iran. Tentunya kesepakatan ini menggeser konstelasi politik menyangkut isu program nuklir Iran yang selama ini dikontrol Amerika Serikat dan sekutunya di Uni Eropa.

Pra-kesepakatan itu, Iran berdiri sendiri menghadapi Barat. Iran sebelumnya dipaksa mengirim uranium biasa ke Rusia dan Perancis, dan kemudian kedua negara itu memasok uranium yang sudah diperkaya ke Iran. Pasca-kesepakatan, Iran tidak lagi sendirian, melainkan bersama Brasil dan Turki menghadapi Barat.

Bahkan, Brasil dan Turki kini berada di garis depan membela kesepakatan segitiga Tehran tersebut. Perbedaan pendapat antara Brasil dan Turki di satu pihak dan Amerika Serikat dan Barat di pihak lain tak terelakkan lagi.

Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, bahkan menegaskan, Iran telah melakukan apa yang semestinya dan masyarakat internasional hendaknya menghargai apa yang dilakukan Iran. Namun, Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah menyatakan pembahasan rancangan sanksi baru terhadap Iran di forum Dewan Keamanan PBB akan terus berlanjut walau ada kesepakatan segitiga Tehran itu.¹

Mengenai kebijakan politik luar negerinya terhadap Iran, secara historis fakta menunjukkan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Iran diawali dengan sebuah hubungan diplomatik yang mesra. Amerika Serikat dan Iran resmi memulai hubungan kenegaraan pada akhir tahun 1800 ketika Raja Nasser al Din Shah mengirim duta besarnya ke Washington. Demi menyelamatkan keuangan kerajaan Iran yang kacau, Amerika Serikat pada tahun 1911 juga mengirim Morgan Shuster, seorang Bankir Niaga Amerika Serikat, ke Iran, dan seorang penasihat ekonomi, Arthur Chester Millspaugh, demi memimpin keuangan kerajaan di Iran. Di bawah tangan mereka keuangan Iran berkembang dengan pesat, ekonomi Iran mulai terbangun dan Iran mulai menjalin hubungan perdagangan dengan Barat. Sejak saat itu sampai pecahnya Perang Dunia II, hubungan kedua negara ini terjalin dengan baik. Undang-undang yang berlaku di Iran banyak dibuat

¹ "Islam dan Neososialis Melawan Barat". Harian Kompas. 22 Mei 2010

berdasarkan pendapat dan arahan dari Amerika Serikat. Iran memposisikan Amerika Serikat sebagai "kekuatan ketiga" dalam perjuangan Iran membebaskan diri dari campur tangan dan dominasi Inggris dan Rusia.

Momentum buruk hubungan Iran dan Amerika Serikat adalah ketika lenyapnya rezim Shah. Bantuan Amerika Serikat yang memajukan perekonomian Iran yang diikuti dengan penjajahan kapitalisme dan materialisme, dianggap oleh rakyat Iran sebagai godaan setan. Kebencian rakyat Iran tidak dapat dicegah akibat benturan peradaban ini. Dan lahirlah Revolusi Iran yang dikomandoi oleh Imam Khomeini dengan ditandai berdirinya Negara Republik Islam Iran. Sebuah negara dengan semangat keberanian tinggi yang diikuti dengan nasionalisme religius yang tinggi.

Dan ditambah lagi dengan adanya kesepakatan historis segitiga Tehran tentang pertukaran uranium antara Turki, Brazil dan Iran, membuat Amerika Serikat berpendapat, apabila Iran menjadi kuat secara politis dengan kerjasamanya bersama Brazil dan Turki dan mampu memfasilitasi sekaligus mengembangkan solidaritas Islam dan penentangan terhadap dominasi Amerika Serikat dan Barat di Timur Tengah, maka akan banyak sekali kepentingan Amerika Serikat yang terancam, disamping tingginya biaya politik, militer, dan kepentingan yang harus ditebus oleh Amerika Serikat. Mengakibatkan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat berubah, yang pada awalnya mendukung program nuklir Iran, dengan asumsi agar tenaga listrik Iran tercukupi dan agar minyak bisa tereksploitasi lebih besar, menjadi berkeinginan untuk menghapus

keberadaan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah dan melarang negara Iran untuk mengembangkan nuklir. Yang menjadikan alasan Amerika Serikat dalam menghalangi Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir adalah alasan politis. Negara-negara Barat terutama Amerika, tidak menginginkan hegemoninya terancam oleh kekuatan baru dunia, apalagi itu adalah negeri Islam seperti Iran. Selain itu, Amerika Serikat ingin menguasai pasar senjata dan keamanan dengan mencegah pembentukan kekuatan oleh negara-negara di Timur Tengah. Yang merupakan bagian dari kepentingan nasionalnya, karena tindakan Amerika Serikat di negara Iran juga menggunakan kekuatan militer dan berharap meningkatkan *prestise* dalam sistem internasional.²

Kurang dari 24 jam setelah Deklarasi Tehran dibacakan, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya menyepakati draft resolusi Dewan Keamanan PBB yang menentang program nuklir sipil Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat juga menyatakan Amerika Serikat bersama dengan kelompok 5+1 (Amerika Serikat, Perancis, Rusia, Cina, Inggris dan Jerman) menyepakati draft resolusi Dewan Keamanan PBB soal sanksi terhadap Iran. Dan untuk mencapai kesepakatan final, draft tersebut juga harus disepakati oleh anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.³

² Rourke, John T.. *International Politics on The World Stage*. University of Connecticut. Hartford. 1986.

³ Reaksi terhadap Deklarasi Tehran. Selasa, 04 Oktober 2011. <http://indonesian.irib.ir/> diakses

Amerika Serikat di bawah Obama memang jelas sangat jauh berbeda dengan masa George W. Bush. Amerika Serikat di bawah Bush tidak pernah melihat Iran seperti apa, hanya ucapan-ucapan sepihak dari yang tidak berkenan bagi Iran. Iran pun menyikapi hal serupa terhadap Amerika Serikat. Hal itu justru malah semakin menjauhkan hubungan kedua negara tersebut.

Sementara itu, di lain pihak, Erdogan seolah ingin berpesan kepada Amerika Serikat, bahwa Turki sudah berubah cepat dan berpihak serta membela Arab Islam yang pernah dijauhkan oleh Kamal Attaturk yang menjilat Eropa. Kunjungan Erdogan ke Iran tahun 2009 yang lalu juga menegaskan bahwa bahwa Turki tidak akan ikut dalam embargo ekonomi terhadap negeri para Mullah ini.

Kapasitas Brasil juga tidak jauh berbeda dari Turki. Brasil di bawah Presiden Luiz Inacio Lula da Silva berhasil membangun perekonomiannya secara fantastis. Presiden Lula da Silva berlatar belakang ideologi kiri (neososialis) dapat leluasa berhubungan erat dengan para pemimpin anti-Barat, seperti Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dan Presiden Venezuela Hugo Chavez. Kedekatan hubungan Lula da Silva dan Ahmadinejad, berandil besar pada tercapainya kesepakatan segitiga Tehran

Secara strategis, kesepakatan segitiga Tehran merupakan refleksi koalisi gerakan Islamis (Iran dan Turki) dan Neososialis (Brasil) melawan hegemoni Barat, serta tuntutan terbentuknya kemitraan (menolak unilateral Barat) di antara semua kekuatan di dunia ini dalam menghadapi persoalan besar termasuk isu nuklir Iran itu sendiri.

Sebagai kekuatan politik yang terus mengalami kebangkitan, Turki tidak ragu-ragu lagi untuk menempatkan dirinya di tengah kontroversi besar. Turki adalah pemain besar dalam penciptaan perdamaian Arab Saudi dan Israel dan telah menengahi pembicaraan tidak langsung antara Suriah dan Israel. Selain itu, Turki juga berperan aktif ikut mengupayakan mediasi dalam mengatasi krisis nuklir Iran, dan Ankara mendukung armada yang baru-baru ini mencoba untuk memecahkan blokade Israel di Gaza yang secara langsung kesemuanya ikut menaikkan posisi tawar menawar Turki di antara negara-negara dunia.

Politik luar negeri Turki memang sedang mengalami perubahan sejak AKP mulai berkuasa. Dari haluan yang pasif dan berdimensi tunggal menjadi diplomasi yang dinamis dan multi dimensional. Musuh-musuh dari masa lalu oleh Turki dirangkul kembali, seperti Rusia, Suriah dan Irak. Kini ketiga negara tersebut termasuk sekutu Turki yang paling erat. Terutama Rusia, kini menjadi mitra energi dan perdagangan terpenting. Selama krisis Georgia, Turki ikut berpengaruh sehingga kesepakatan perdamaian antara Georgia dan Rusia dapat tercapai.

Skripsi ini mencoba melihat sejauh mana posisi Turki dalam konstelasi politik internasional berhadapan dengan kekuatan adidaya seperti Amerika Serikat. Paling tidak hal tersebut akan tercermin dalam bentuk kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Turki.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis eksplorasi di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

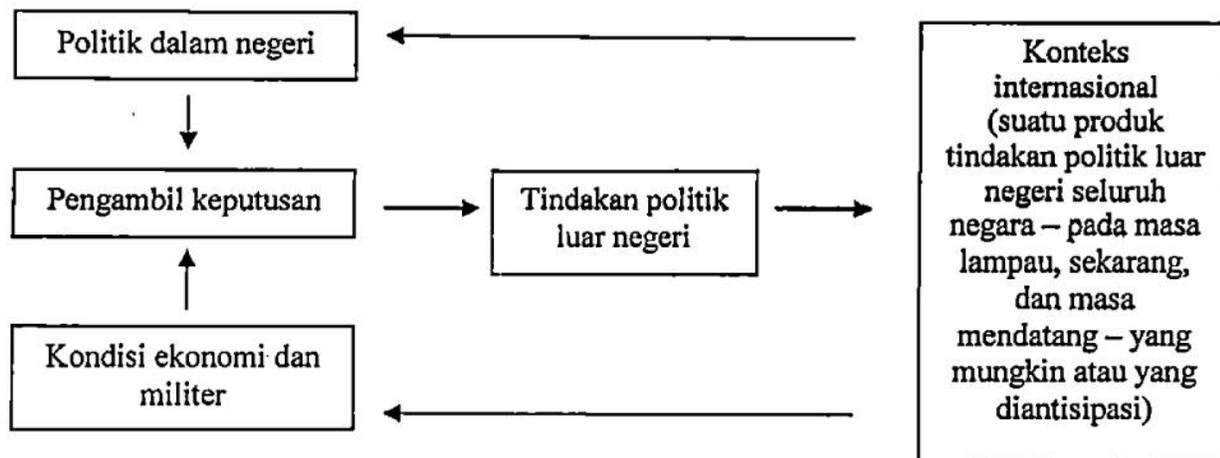
Mengapa politik luar negeri Turki berbeda dengan politik luar negeri Amerika Serikat menyangkut isu nuklir Iran?

C. Kerangka Teori

Teori Politik Luar Negeri

Untuk menjelaskan permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan teori Politik Luar Negeri yang disampaikan William D. Coplin dalam bukunya "*Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis*" yang dialih-bahasakan oleh Drs. Marsedes Marbun.

Menurut William D. Coplin, tindakan politik luar negeri tertentu mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri mengambil keputusan politik luar negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer; dan ketiga, konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem itu. Gambar 1 mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor yang disebutkan tadi berinteraksi untuk menghasilkan tindakan politik luar negeri.



Sumber: William D. Coplin, Drs. Marsedes Marbun, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis, hal. 30

Coplin juga menjelaskan tentang hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri, yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka, yang disebut dengan *policy influencers*. Dan hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri tadi dengan para pengambil keputusan politik luar negeri yang disebut dengan *policy influence system*.

Dalam kasus yang diangkat penulis, *policy influencers* yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Turki menyangkut isu nuklir Iran adalah kebangkitan AKP, yang merupakan salah satu dari empat kategori *policy influencers*, yaitu partisan, birokratis, kepentingan dan *mass influencers*, yang mana akan saling berpengaruh.

Peristiwa kudeta di Turki pada bulan Februari 1997 yang berbuntut pada dihubarkannya Partai Fazilet yang dipimpin oleh tokoh Islamis Necmeddin

Erbakan, menjadi cikal bakal lahirnya AKP. Ketika itu, dua tokoh Partai Fazilet, Recep Tayyep Erdogan dan Abdullah Gul menyatakan memisahkan diri dari gerakan Islam yang dipimpin Erbakan dan membentuk AKP pada 14 Agustus 2001. AKP yang mengawali terbukanya era demokrasi di Turki dengan memperkuat legitimasi pemerintahan sipil sejak kemenangannya dan terpilihnya Ketua AKP, Recep Tayyib Erdogan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2002, disusul terpilihnya Abdullah Gul sebagai Presiden Turki.

Erdogan secara perlahan berhasil membatasi wewenang militer dalam politik dengan mereformasi militer dan pemecatan sejumlah perwira tinggi militer yang diduga berencana melakukan kudeta pada tahun 2010. Dia juga mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga demokratis. AKP yang dikenal sebagai Partai Islam ini telah dianggap sebagai musuh sekulerisme oleh kalangan sekulerisme dan secara perlahan mengurangi nilai-nilai sekuler di Turki dan mengembalikan nilai-nilai dan tradisi Islam. Kebijakan seperti menaikkan pajak minuman keras menjadi salah satu negara dengan pajak minuman keras paling tinggi di Eropa merupakan cara halus Turki mengembalikan nilai-nilai keislaman yang perlahan tapi pasti semakin mengikis tradisi sekuler Turki.

Erdogan dan AKP terus memanfaatkan demokrasi, dan melakukan perubahan yang lebih luas. Bukan hanya perubahan dalam skala nasional Turki, tetapi yang diinginkan oleh adalah Erdogan perubahan di setiap kawasan di Turki, dan bahkan juga perubahan secara global. Oleh sebab itu, Turki terus memainkan peranannya secara regional dan global. Langkah-langkah yang dilakukan Erdogan

sangat tersusun dan tegas. Pembelaannya terhadap dunia Islam dan negara-negara Islam juga sangat mengagumkan.

Meski AKP ingin menjadikan Turki bagian dari Eropa, namun AKP tetap kritis dalam berhubungan dengan negara-negara Eropa dalam menyikapi masalah nuklir Iran dan Israel. Sikap AKP di bawah pimpinan Erdogan dalam masalah nuklir Iran dan Israel ini menarik simpati dan sejalan dengan mayoritas keinginan rakyat Turki, yakni melawan kesewenang-wenangan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Israel yang melakukan ketidakadilan terhadap negara-negara Islam.

Politik luar negeri Turki memang sedang mengalami perubahan sejak AKP mulai berkuasa. Dari haluan yang pasif dan berdimensi tunggal menjadi diplomasi yang dinamis dan multi dimensional. Musuh-musuh dari masa lalu oleh Turki dirangkul kembali, seperti Rusia, Suriah dan Irak. Kini ketiga negara tersebut termasuk sekutu Turki yang paling erat. Terutama Rusia, kini menjadi mitra energi dan perdagangan terpenting. Selama krisis Georgia, Turki ikut berpengaruh sehingga kesepakatan perdamaian antara Georgia dan Rusia dapat tercapai.

Seakan-akan lingkungan dalam negeri tidak cukup rumit oleh adanya tuntutan dan persaingan di antara para *policy influencers*, pengambil keputusan politik luar negeri harus pula mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negaranya ketika ia menyusun politik luar negeri. Dia harus

menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami semua keterbatasannya, yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi ekonomi dan militer.⁴

Dalam bukunya, Coplin menjelaskan bagaimana faktor-faktor ekonomi dan militer saling berkaitan sekali dengan pembentukan politik luar negeri suatu negara. Dikatakan bahwa terdapat dua dimensi yang relevan dengan penyusunan politik luar negeri, yaitu kapasitas produksi ekonomi dan kebergantungan ekonomi pada perdagangan dan finansial internasional. Dari segi militer, Coplin mengatakan kekuatan militer suatu negara tidak hanya bergantung pada jumlah personal, tingkat pelatihan dan perlengkapannya, tetapi juga bergantung pada tingkat dukungan luar negeri serta peran angkatan bersenjata dalam memelihara stabilitas dalam negeri. Dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi dan militer suatu negara dapat menjadi alat politik negerinya. Keunggulan ekonomi dan militer tidak dengan sendirinya menyajikan alat, yang pada umumnya kuat dalam mencapai sasaran politik luar negeri bagi para pengambil keputusan politik luar negeri.

Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil, karena dapat mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perekonomian suatu negara dapat dijadikan sebuah tolak ukur bagi kemampuan dan *bargaining position* negara dalam pergaulan internasional. Besarnya anggaran negara yang digunakan untuk sarana militer

⁴ Conlin. William D., Marsedes Marbun. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis.*

juga bisa dijadikan ukuran kekuatan negara untuk melindungi kepentingan nasional negara tersebut. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Semakin baik perekonomian dan militer suatu negara akan mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya.

Kebangkitan AKP tidak lain adalah karena langkah-langkah strategis yang diambil oleh Erdogan dalam memperbaiki Turki di bidang ekonomi dan politik. Langkah yang dilakukannya sangat jelas. Erdogan berhasil membawa Turki mengatasi krisis ekonomi, dan sekarang ini, di tengah-tengah krisis global yang melanda Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, ekonomi Turki tetap mengalami pertumbuhan yang memngejutkan. Seluruh sektor ekonomi dan perdagangan mengalami kemajuan yang signifikan. Kini, Turki menjadi kekuatan ekonomi di tangga keempat di Eropa.

Kebijakan politik Turki yang semakin konfrontasional kepada Barat tidak hanya memiliki perspektif ideologis namun juga bisnis. Diversifikasi hubungan ekonomi dan diplomatiknya dengan negara-negara Timur Tengah telah menggeser Turki dari kebijakan tradisionalnya yang pro-Barat.

Turki telah melangkah keluar dari bayang-bayang dan sekarang menuju sebagai negara adidaya di panggung dunia yang pernah dipegang oleh pendahulunya, Khilafah Otsmaniyah. Turki dengan populasi penduduknya, dan dengan budayanya, serta latar belakang sejarahnya, yang pernah menjadi Khilafah, akan segera berpeluang menjadi negara adidaya di masa depan. Turki

memiliki ekonomi terbesar diantara 17 negara di dunia. Menurut proyeksi Goldman Sachs, ekonomi Turki dapat menembus 10 besar dunia, tahun 2050. Kekuatan ekonominya terus tumbuh dengan baik. Selanjutnya, setelah dalam beberapa dekade mendapat bantuan NATO, militer Turki saat ini merupakan kekuatan regional terbesar di Timur Tengah.

Mungkin yang paling strategis adalah posisi geopolitik Turki yang berada dipersilangan antara Eropa, Timur Tengah dan Asia Tengah. Turki negara mayoritas muslim (99%) yang berdiri di atas reruntuhan Bizantium, dan nampaknya dapat menjembatani tradisi Islam dan Yahudi-Kristen, bahkan saat ini Turki duduk bersama dengan kekuatan dunia lainnya menghadapi masalah-masalah global.

Ibaratnya semua jalan menuju ke Roma terbuka sekali bagi Turki. Turki sekarang membangun jaringan pipa gas terbesar, dan akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi dunia. Kerjasama antara Turki dengan Rusia, yang akan mengeksplorasi gas alamnya, dan mensuplai Turki, maka Turki menjadi kekuatan ekonomi dunia di masa depan. Dan, jika posisi adikuasa hanya dikaitkan dengan pembangunan *real estate* (posisi strategisnya) Turki sudah pasti akan berada di atas negara-negara lainnya di kawasan itu.

Sebagai kekuatan politik yang terus mengalami kebangkitan, Turki tidak ragu-ragu lagi untuk menempatkan dirinya di tengah kontroversi besar. Turki adalah pemain besar dalam penciptaan perdamaian Arab Saudi dan Israel telah menengahi pembicaraan tidak langsung antara Suriah dan Israel. Selain itu, Turki

juga berperan aktif ikut mengupayakan mediasi dalam mengatasi krisis nuklir Iran, dan Ankara mendukung armada yang baru-baru ini mencoba untuk memecahkan blokade Israel di Gaza yang secara langsung kesemuanya ikut menaikkan posisi tawar menawar Turki di antara negara-negara dunia.

D. Hipotesa

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Turki berbeda dengan Amerika Serikat menyangkut isu nuklir Iran, adalah:

1. Kebangkitan AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi* atau Partai Keadilan dan Pembangunan, dalam bahasa Inggris JDP *Justice and Development Party*) memberi pengaruh besar terhadap kebijakan politik luar negeri Turki.
2. Turki mengambil kebijakan politik luar negeri yang berbeda dengan Amerika Serikat menyangkut isu nuklir Iran dikarenakan negara itu telah mandiri secara ekonomi dan militer.

E. Jangkauan Penelitian

Sebagai sebuah usaha untuk menghindari diri dari penulisan ilmiah yang terlampau luas dan tidak terarah sehingga akan mengaburkan isi dan topik pembahasan, maka di perlukan pembatasan. Upaya pembatasan masalah tersebut dimaksudkan agar penulis tetap terfokus pada masalah yang diteliti sehingga akan mempermudah dalam pengumpulan dan penelitian data. Selain itu, penyempitan

masalah yang akan di kaji juga bertujuan untuk membuat penulis maupun pembaca tidak melenceng jauh dari apa yang akan dan telah dikaji.

Jadi, penulis memberi batasan dalam penulisan skripsi ini dimulai dari hubungan antara Turki dan Amerika Serikat pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 sampai dimana adanya perbedaan kebijakan politik luar negeri antara kedua negara tersebut menyangkut isu nuklir Iran.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder yang dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan:

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi literature yang relevan, surat kabar dan internet.
2. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, kapan atau berapa yang berwujud pada menganalisa dari fakta-fakta yang terkumpul. yang didapat melalui data

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas, perlu adanya uraian sistematika penulisan untuk memudahkan menelusuri alur pikiran analisa penulisan. Penulisan ini dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini berisikan pendahuluan yang menjelaskan tentang tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang akan member gambaran mengenai topik yang akan dibahas,
- BAB II : Bab ini menguraikan tentang hubungan strategis antara Turki dengan Amerika Serikat,
- BAB III : Bab ini menjelaskan tentang kebijakan politik luar negeri Turki menyangkut isu nuklir Iran,
- BAB IV : Bab ini berisikan tentang faktor-faktor yang membuat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dan Turki berbeda menyangkut isu nuklir Iran,
- BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang dibahas.